

ANALISIS KETIMPANGAN PDRB PERKAPITA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Andre Josep Kurnia
165020100111005**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2021**

Judul : Analisis Ketimpangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Andre Josep Kurnia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: andrejosepkurnia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis, serta variabel transport/jarak terhadap kemampuan penciptaan output Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Serta, mengidentifikasi pengaruh beta kemampuan penciptaan output terhadap ketimpangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga meninjau karakteristik daerah (tipologi klassen dan pattern Kabupaten/Kota) untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan PDRB Perkapita di Provinsi Jawa Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariate dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa semua variabel berdampak signifikan pada kemampuan penciptaan output dan hanya variabel dependency yang berdampak negatif pada kemampuan penciptaan output. Sedangkan, beta kemampuan penciptaan output berdampak signifikan secara positif pada ketimpangan PDRB Perkapita. Hasil juga menemukan bahwa ketimpangan PDRB Perkapita masih terjadi di Jawa Timur. Sementara, Pattern Kabupaten/Kota di Jawa Timur lebih mengarah pada bentuk jaringan dan ditemukan kesesuaian dengan unsur culture di Jawa Timur. Artinya, karakteristik daerah Jawa Timur cukup unik dan cenderung dibedakan oleh culture. Masalah Ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur tidak bisa digeneralisasikan. Sehingga, dalam formulasi kebijakan perlu memperhatikan variabel konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis, transport/jarak dan tentunya pattern Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kata kunci: PDRB Perkapita, Ketimpangan, Spesialisasi Regional, Kondisi Demografis, Transport/Jarak, Indeks Gravitasi

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian Teori *circulair cumulative causation* menyatakan bahwa, ketimpangan disebabkan oleh *backwash effects* yang lebih besar dari *spread effects*. Dalam konteks ini, *backwash effects* terjadi ketika ekspansi ataupun konsentrasi aktifitas ekonomi pada daerah yang lebih maju cenderung menimbulkan hambatan bagi daerah kurang maju untuk berkembang. Terdapat kecenderungan untuk sumber daya-sumber daya menuju pada daerah yang lebih maju. Sehingga, daerah kurang maju kekurangan sumber daya untuk mengerek perekonomiannya. Sedangkan, *spread effects* terjadi ketika ekspansi ataupun konsentrasi aktifitas ekonomi cenderung mengerek daerah kurang maju untuk lebih berkembang. Hal ini disebabkan oleh peningkatan aktifitas ekonomi pada daerah yang lebih maju cenderung memberikan tambahan permintaan akan komoditas pada daerah kurang maju.

Provinsi Jawa Timur memiliki peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,93 persen terhadap penciptaan PDB Indonesia. Provinsi Jawa Timur hanya satu tingkat di bawah DKI Jakarta yang berkontribusi sebesar 16,63 persen. Sementara, provinsi lainnya, seperti: Jawa Barat (13,5 persen), Jawa Tengah (8,98 persen), DIY (0,95 persen) dan Banten (4,14 persen). Dari sisi demografis, Provinsi Jawa Timur juga menduduki posisi kedua dalam persentase jumlah penduduk terhadap penduduk nasional (sebesar 14,89 persen). Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selalu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, keberadaan Jawa Timur cukup penting dalam proses mengatasi ketimpangan.

Indikasi ketimpangan di Provinsi Jawa Timur bisa ditinjau dari perbedaan kemampuan penciptaan output pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara kasar, terdapat indikasi bahwa penciptaan output di Jawa Timur lebih banyak dikontribusikan oleh daerah-daerah, seperti: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang maupun Kota Malang. Daerah-daerah tersebut menyumbang sekitar 61,3 persen dari total PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019 (ADHK 2010).

Disamping itu, produk domestik regional bruto perkapita antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Daerah Kota Kediri, Kota Surabaya, Kota Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Malang memiliki PDRB Perkapita yang relatif tinggi. Daerah-daerah dengan produk domestik regional bruto perkapita tinggi, memiliki indikasi sebagai daerah yang menjadi konsentrasi aktifitas ekonomi. Tidak bisa dipungkiri

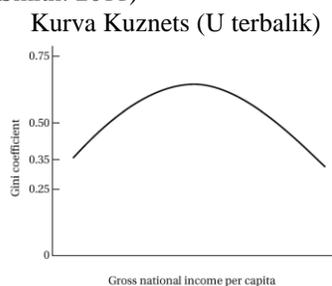
bahwa sejak era 1970-1990 an terjadi konsentrasi aktifitas ekonomi di tanah Jawa. Salah satunya, di provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan koridor utara-selatan (*the north-south corridor*). Aktifitas ekonomi terkonsentrasi dari utara sampai selatan, seperti: pada daerah Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Malang. Konsentrasi aktifitas ekonomi di satu sisi bisa meningkatkan efisiensi produksi. Akan tetapi, hal tersebut bisa meningkatkan ketimpangan antar wilayah (wilayah produktif dan tidak produktif).

Secara lebih lanjut, terdapat perdebatan hasil pada penelitian terdahulu tentang arah pengaruh dari variabel-variabel yang terindikasi menyebabkan ketimpangan, seperti: konsentrasi aktifitas ekonomi (sektor manufaktur), kondisi demografis (konsentrasi kependudukan, *employment*, dan *dependency*), serta variabel *transport/jarak*. Penelitian terdahulu cenderung meninjau dampak langsung dari variabel-variabel terkait (seperti: konsentrasi aktifitas ekonomi (sektor manufaktur), kondisi demografis (konsentrasi kependudukan, *employment*, dan *dependency*), serta variabel *transport/jarak* yang terindikasi berpengaruh pada ketimpangan pdrb perkapita di Provinsi Jawa Timur. Meskipun, terdapat indikasi bahwa variabel-variabel yang sama berdampak pada output terlebih dahulu. Selain itu, terdapat indikasi bahwa penelitian-penelitian terdahulu tentang ketimpangan juga belum memperhatikan karakteristik daerah yang diteliti. Perlu juga diketahui, bahwa sampai saat ini isu ketimpangan pdrb perkapita atau isu pemerataan Kabupaten/Kota di Jawa Timur menjadi salah satu isu strategis dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, topik penelitian ini tergolong menarik untuk diteliti. Oleh karenanya, penulis mengangkat judul “Analisis Ketimpangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hipotesis Kuznets

Ketimpangan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi. Ketimpangan menunjukkan keadaan yang mana distribusi pendapatan tidak merata. Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada awal tahap pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, kemudian pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan itu akan membaik. (Todaro dan Smith: 2011)



Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar daerah (wilayah) mula-mula dimunculkan oleh Douglass C. North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neoklasik. Dalam teori tersebut dimunculkan prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut kemudian dikenal sebagai hipotesa neoklasik.

Para penganut neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, naik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga ahli cenderung terkonsentrasi di daerah maju sehingga ketimpangan regional cenderung melebar. Akan tetapi, bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas transportasi, maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan begitu, maka ketimpangan pembangunan akan berkurang.

2. Teori Ketimpangan Model Kaldor

Model Kaldor menggambarkan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata terjadi seiring dengan meningkatnya kemampuan penciptaan output (pertumbuhan ekonomi). Ketimpangan yang tinggi terjadi seiring dengan tingginya pertumbuhan ekonomi. Boleh jadi, dikatakan bahwa distribusi pendapatan yang lebih merata terjadi seiring dengan pertumbuhan secara agregat yang lebih rendah. Bisa dikatakan bahwa terdapat *trade off* antara pertumbuhan ekonomi secara agregat dengan ketimpangan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah model kaldor tidak hanya bisa digunakan dalam konteks ketimpangan antara kelompok pekerja dan kelompok pemilik modal (kapitalis). Namun, secara general bisa pada konteks lain, seperti ketimpangan desa-kota, maupun ketimpangan daerah maju dan tertinggal.

3. Teori Circulair Cumulative Causation

Myrdal (1976:56), menggagas teori *circulair cumulative causation* (proses sebab akibat kumulatif). Menurutnya, ekspansi di suatu tempat (daerah) bisa memiliki pengaruh-pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) bagi daerah lainnya. Tempat-tempat yang mana kegiatan ekonomianya mengalami ekspansi akan menarik sumber daya-sumber daya (baik tenaga kerja, modal, barang-barang dan jasa) masuk ke dalamnya. Sebagai contoh: kemiskinan di pedesaan eropa adalah akibat struktur umur yang tidak menguntungkan di daerah-daerah tersebut. Hal ini dikarenakan oleh penduduk usia produktif di daerah tersebut yang cenderung terserap ke daerah lebih maju (Amerika Serikat) dan ditambah dengan tingkat fertilitas yang tinggi. Di sisi lain, terserapnya modal pada daerah maju mengakibatkan bertambahnya ketidakmerataan. Pada daerah-daerah pusat yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong bertambahnya investasi, pertambahan inipun selanjutnya akan menyebabkan bertambahnya pendapatan. Pertambahan pendapatan akan bisa meningkatkan permintaan. Yang mana, pada giliran berikutnya akan menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah lain, yang mana momentum ekspansioner yang baru sangat kurang, permintaan terhadap modal untuk investasi akan tetap lemah, bahkan kendatipun dibandingkan dengan penawaran tabungan yang dengan sendirinya rendah sebagai akibat rendahnya pendapatan, dan cenderung untuk semakin rendah. Studi yang dilakukan di banyak negara memperlihatkan betapa sistem perbankan, jika tidak ada aturan yang mengharuskan bertindak lain, cenderung untuk menjadi alat penyedot tabungan di daerah-daerah miskin untuk daerah-daerah yang lebih kaya dan lebih progressif yang mana hasil investasi adalah tinggi dan pasti. Disamping itu, kegiatan perdagangan juga bergerak dengan kecenderungan yang menguntungkan di daerah-daerah yang lebih kaya dan lebih progressif dengan merugikan daerah-daerah lainnya. Kebebasan dan semakin meluasnya pasar seringkali memberikan keuntungan bersaing yang sedemikian rupa kepada industri-industri di pusat ekspansi yang sudah mapan, yang biasanya bekerja dalam keadaan semakin naik hasil tambahannya. Sehingga, industri-industri di daerah lain yang bersaing bisa terancam kematian.

Sementara itu, lawan dari *backwash effect* ialah *spread effects*. Sudah sewajarnya jika daerah di sekitar pusat ekspansi (disekitar daerah yang lebih maju) memperoleh keuntungan dari bertambah besarnya penampung hasil-hasil pertanian mereka dan didorong dengan menggunakan kemajuan teknologi di segala bidang. Selain itu, terdapat saluran lain bagi *spread effects* ke daerah-daerah lain. Yang mana, terdapat kondisi yang menguntungkan untuk menghasilkan bahan-bahan mentah bagi industri-industri yang sedang bertumbuh di pusat-pusat ekspansi. Jika, jumlah pekerja yang memperoleh di daerah-daerah yang lebih jauh tersebut cukup besar, maka bahkan industri-industri barang konsumsipun akan memperoleh dorongan berkembang disana. Daerah-daerah ini, dan juga semua daerah-daerah lainnya yang mana pemulaian-pemulaian baru sedang berlangsung dan ternyata berhasil baik, pada gilirannya akan menjadi pusat-pusat baru bagi ekspansi ekonomi yang bergerak dengan kekuatannya sendiri. Hal ini akan terjadi dengan catatan, momentum ekspansioner (*spread effect*) cukup kuat untuk mengalahkan *backwash effect* dari pusat-pusat lama. (Myrdal: 1976, 62)

4. New Economic Geography

Teori *New Economic Geography* tidak lepas dari konsep *core-periphery* milik Paul Krugman. Krugman (1995), menggambarkan suatu perekonomian yang terdiri dari dua daerah, yakni: *North* dan *South*. Kedua Negara (daerah), masing-masing mampu memproduksi dua macam barang, yakni: pertanian (*constant return to scale*) dan manufaktur (*increasing return to scale*). Semua negara (daerah) sama-sama profisien dalam kedua sektor: kedua negara tidak memiliki perbedaan keunggulan komparatif yang mencolok.

Dengan asumsi biaya transportasi yang sangat tinggi, kedua daerah akan cenderung memenuhi kebutuhannya sendiri. Kedua daerah akan memproduksi barang hasil pertanian dan manufaktur sendiri. Namun, saat biaya transportasi menurun, maka akan ada kemungkinan untuk terjadinya perdagangan antar daerah. Selama biaya transportasi relatif tinggi, maka tidak akan ada spesialisasi dalam tingkat agregat. Saat biaya transportasi menurun, maka perekonomian akan secara spontan merespon dengan munculnya daerah *core* (yang terindustrialisasi) dan *periphery* (yang terdeindustrialisasi). Jika, sektor manufaktur cukup besar, perbedaan peranan antara *core* dan *periphery* akan berkaitan dengan divergensi pada upah riil. Keuntungan dalam spesialisasi industry yang tercipta dari keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja pada daerah industry, sementara penurunan sektir industry di daerah lain akan menurunkan tingkat permintaan tenaga kerja. Upah riil dalam hal ini cenderung meningkat di daerah *core* dan menurun di daerah *periphery*. Integrasi ekonomi cenderung menghasilkan dampak pembangunan yang tidak diinginkan, yakni ketimpangan pembangunan.

Namun, ketika biaya transportasi menurun. Pentingnya kedekatan dengan bahan baku dan pasar ataupun *forward linkage* dan *backward linkage* akan menurun juga. Hal ini berarti bahwa daerah *periphery* akan menawarkan keuntungan, yakni tingkat upah yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, penurunan biaya transportasi akan cukup untuk mengimbangi kerugian dari jauhnya suatu daerah dari pasar atau bahan baku. Pada titik ini, industri akan

memiliki insentif yang cukup untuk berpindah dari wilayah *core* ke *periphery* sekali lagi, sehingga memaksa terjadinya konvergensi tingkat upah.

Konsep *New Economic Geography*, menggambarkan pola hubungan suatu wilayah akan berdampak pada terjadi atau tidaknya ketimpangan. Konvergensi dan divergensi dalam hal ini bergantung pada seberapa besar keuntungan dari *forward linkage* dan *backward linkage* pada suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain, serta melihat keadaan atau lokasi suatu daerah. Kerjasama antar daerah, tingkat akses dan mobilitas menjadi hal penting dalam hal ini.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menjelaskan fenomena ketimpangan regional di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2019. Secara lebih spesifik, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariate dan analisis deskriptif. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi ketimpangan regional di Jawa Timur. Adapun model yang digunakan dalam analisis multivariate adalah sebagai berikut:

Model 1

$$Output (Y) = \alpha + \beta_1Kons_Industri + \beta_2Density + \beta_3Employment + \beta_4Dependency + \beta_5Tanjung_Perak + \beta_6D_Tol + e_1$$

Yang mana:

- Output = Kemampuan Penciptaan Output (PDRB ADHK masing-masing Kabupaten/Kota di Jatim)
- Kons_Industri = Konsentrasi Sektor Industri Pengolahan (Indeks Spesialisasi Regional)
- Density = Kepadatan Penduduk (1000 jiwa/km)
- Employment = Total Penduduk Yang Bekerja pada Tiap Kabupaten/Kota (Ribuan)
- Dependency = Angka Beban Ketergantungan masing-masing Kabupaten/Kota di Jatim
- Tanjung_Perak = Aksesibilitas Terhadap Pelabuhan Tanjung Perak (Indeks Hansen Pada P. Tanjung Perak)
- D_Tol = Dummy Ketersediaan Tol di Jatim (1= Daerah dengan jalan tol; 0=Daerah tanpa jalan tol)

Model 2

$$Z = \alpha + \beta_1\hat{Y} + e_1$$

Yang mana:

- \hat{Y} = Beta Kemampuan Penciptaan Output (Kemampuan Penciptaan Output yang dipengaruhi seluruh variabel dependen pada model 1)
- Z = Ketimpangan PDRB Perkapita (Y_Cap)

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menggunakan tipologi klassen dan *pattern* Kabupaten/Kota. Secara lebih spesifik, akan dijelaskan mengenai tipologi klassen dan *pattern* Kabupaten/Kota dalam konteks ini. Tipologi klassen dibentuk dari *growth* dan *income* masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Yang diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yakni: "*high growth, hi income*"; "*low growth, high income*"; "*high growth, low income*"; "*low growth, low income*". Sedangkan, *pattern* Kabupaten/Kota di Jawa Timur ditinjau dari hubungan antar massa (indeks gravitasi). Selain itu, penentuan *core* dalam *pattern* Kabupaten/Kota memperhatikan beberapa hal, diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Penelitian Sakti (2005) yang membahas tentang koridor utara-selatan di Jawa Timur; Tipologi Klassen. Adapun, rumus indeks gravitasi berdasarkan Hamilton (2003), adalah sebagai berikut:

$$Tab = \frac{Pa \cdot Pb}{D_{ij}^2}$$

Yang mana:

- Tab = Total gravitasi antara Kabupaten/Kota a dengan Kabupaten/Kota b
- Pa = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota a
- Pb = Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota b
- Dab = Jarak antara Kabupaten/Kota a dengan Kabupaten/Kota b

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh dari konsentrasi aktifitas ekonomi (sektor industri pengolahan), kondisi demografis (konsentrasi kependudukan (*population density*), *employment*, dan *dependency* (*dependency ratio*/angka beban ketergantungan)), dan variabel *transport*/jarak (aksesibilitas pada pelabuhan Tanjung Perak dan *dummy* jalan

tol) terhadap kemampuan penciptaan output (PDRB (Y)). Selain itu meneliti pengaruh dari beta kemampuan penciptaan output terhadap ketimpangan pdrb perkapita (Y_Cap). Adapun beta kemampuan penciptaan output (\hat{Y}) merupakan variabel kemampuan penciptaan output yang dipengaruhi oleh konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis dan variabel *transport/jarak*.

Adapun variabel-variabel yang diteliti pada batasan daerah Jawa Timur (yakni: 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur). Batasan periode tahun yang digunakan adalah tahun 2010-2019. Secara lebih lanjut, penelitian ini juga meninjau karakteristik daerah Jawa Timur melalui tipologi klassen dan indeks gravitasi. Muara akhir yang diharapkan dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah ketimpangan pdrb perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019. Identifikasi tersebut memiliki batasan yang telah disebutkan sebelumnya:

- Meninjau pengaruh dari variabel konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis dan *transport/jarak* pada kemampuan penciptaan output.
- Meninjau pengaruh dari kemampuan penciptaan output yang dipengaruhi oleh konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis dan *transport/jarak* pada ketimpangan pdrb perkapita.
- Meninjau karakteristik daerah Jawa Timur melalui tipologi klassen dan indeks gravitasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis multivariat model 1 diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 : Pengaruh Variabel Independen (X1,...,X6) Terhadap Kemampuan Penciptaan Output (Y)

Variabel	Beta	t-statistik	P-value (Sig.)	Keterangan	
				Arah	Signifikansi
X1 (Kons_Industri)	21.560,611	14,986	0,000	Positif	Signifikan
X2 (Density)	1,095	2,361	0,019	Positif	Signifikan
X3 (Employment)	42,156	14,034	0,000	Positif	Signifikan
X4 (Dependency)	-837,553	-3,807	0,000	Negatif	Signifikan
X5 (T. Perak)	7,781	34,204	0,000	Positif	Signifikan
X6 (D_TOL)	14.366,413	6,010	0,000	Positif	Signifikan
R ² = 0,943					
KD = 94,3 %					
Sig. F = 0,000					

Sumber: SPSS 24, (Penulis, 2021)

Analisis multivariat model 2 diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 : Pengaruh Beta Kemampuan Penciptaan Output (\hat{Y}) Terhadap Ketimpangan PDRB Perkapita (Z)

Variabel	Beta	t-statistik	P-value (Sig.)	Keterangan	
				Arah	Signifikansi
\hat{Y} (Beta Kemampuan Penciptaan Output)	18,667	9,593	0,000	Positif	Signifikan
R ² = 0,196					
KD = 19,6 %					
Sig. F = 0,000					

Sumber: SPSS 24, (Penulis, 2021)

Tipologi Klassen diperoleh hasil sebagaimana pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 : Tipologi Klassen

Laju Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan Diatas Rata-Rata ($y_i > Y$)	Laju Pertumbuhan Di Bawah Rata-Rata ($y_i < Y$)
Pendapatan Perkapita		

PDRB Perkapita di atas Rata-Rata ($r_i > \bar{r}$)	<i>Daerah Maju</i>	<i>Daerah Maju, Tapi Tertekan</i>
	Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Kota Malang, Kota Surabaya, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Bojonegoro	Kota Kediri
PDRB Perkapita di bawah Rata-Rata ($r_i < \bar{r}$)	<i>Daerah Berkembang</i>	<i>Daerah Relatif Tertinggal</i>
	Malang, Banyuwangi, Lamongan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Jember, Probolinggo, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep

Sumber: Hasil olah data Penulis, 2021

Pengaruh Konsentrasi Aktifitas Ekonomi (Sektor Industri Pengolahan) Terhadap Kemampuan Penciptaan Output

Hasil penelitian menemukan bahwa konsentrasi aktifitas ekonomi sektor industri pengolahan berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemampuan penciptaan output di Provinsi Jawa Timur. Hal ini berarti bahwa semakin besar konsentrasi sektor industri pengolahan, maka akan meningkatkan kemampuan penciptaan output. Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa kenaikan 1 angka konsentrasi sektor industri pengolahan atau pangsa sektor industri pengolahan kabupaten atau kota terkait sama dengan sektor industri pengolahan Jawa Timur akan meningkatkan output sebesar 21.560,611 M pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hasil ini sesuai dengan teori ekonomi regional dan penelitian terdahulu (Adisasmita (2018); Mauleny (2015); Sandhika dan Hendarto (2012); Cohen dan Paul (2009); Armstrong dan Taylor (2000)), bahwa tekonsentrasinya aktifitas ekonomi akan membawa dampak positif bagi kemampuan penciptaan output suatu daerah. Dampak positif tersebut diwujudkan dalam keuntungan-keuntungan, berupa: biaya produksi yang lebih rendah, peningkatan produktifitas dan skala ekonomi yang lebih besar.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Otsuka, Goto dan Sueyoshi (2010) dan Adisasmita (2018), bahwa keuntungan-keuntungan tersebut bisa membuat produksi bisa dilakukan dengan lebih efisien (lebih masif dan berbiaya rendah). Produktifitas yang lebih besar pada aktifitas ekonomi pada bagiannya akan berdampak pada peningkatan kemampuan penciptaan output. Dengan demikian, kemampuan penciptaan output akan meningkat dengan adanya peningkatan konsentrasi aktifitas ekonomi. Mengutip istilah Fujita dan Thisse (2002), bisa dikatakan dengan kata lain bahwa kemampuan penciptaan output bisa diperkuat oleh konsentrasi aktifitas ekonomi (sektor industri pengolahan).

Berdasarkan indeks spesialisasi regional, terdapat beberapa daerah yang memiliki konsentrasi atau spesialisasi pada sektor industri pengolahan, diantaranya: Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Tuban. Daerah-daerah ini memiliki pangsa sektor industri pengolahan diatas pangsa sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Timur. Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto merupakan daerah yang sudah *existence* dalam sektor industri pengolahan di Jawa Timur.

Sementara itu, Keberadaan Kabupaten Malang dan Kabupaten Tuban merupakan sebuah fenomena yang muncul akibat limpahan atau pergeseran aktifitas ekonomi sektor industri pengolahan di daerah lain. Sedangkan, Kota Malang dan Kota Surabaya aktifitas ekonominya lebih terdiversifikasi. Meskipun, kontribusinya terhadap output sektor industri pengolahan relatif besar. Namun, kedua daerah ini memiliki indeks spesialisasi regional di bawah 1. Hal ini berarti bahwa, kedua daerah tersebut tidak hanya menggantungkan diri secara masif pada sektor industri pengolahan saja. Kinerja perekonomiannya terdiversifikasi.

Pengaruh Konsentrasi Kependudukan Terhadap Kemampuan Penciptaan Output

Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi demografis (konsentrasi kependudukan) berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemampuan penciptaan output. Hal ini berarti, bahwa peningkatan konsentrasi kependudukan akan meningkatkan kemampuan penciptaan output. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa kenaikan 1000 penduduk/km di suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur meningkatkan 1,095 M output di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu Yegorov (2015); Irawan dan Suparmoko (2002); Armstrong (2000); Jhingan (1996), bahwa penduduk merupakan salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam

penciptaan output. Proses penciptaan output tidak bisa terlepas dari konsentrasi kependudukan. Penduduk bisa menjadi suatu sumber daya dalam penciptaan output dalam konteks perekonomian. Pada satu sisi, penduduk bisa menjadi konsumen yang membutuhkan komoditas untuk dikonsumsi. Di sisi lain, keberadaan penduduk menjadi gambaran dalam ketersediaan sumber daya manusia di suatu daerah. Sejalan dengan penelitian Waldfogel (2008), yang menemukan bahwa konsentrasi secara demografis (utamanya pada orang-orang dengan preferensi atau kebutuhan sejenis) akan memungkinkan ketersediaan komoditas tertentu. Konsumen akan diuntungkan dengan pemenuhan kebutuhan. Sedangkan, penyedia komoditas akan diuntungkan dengan permintaan yang lebih besar. Hal ini tentunya menguntungkan, karena output yang tercipta semakin besar. Semakin terkonsentrasinya penduduk di suatu daerah akan membuat kemampuan penciptaan output daerah tersebut meningkat.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan, bahwa konsentrasi kependudukan di Jawa Timur belum sepenuhnya menunjukkan *peak point*. Beberapa daerah menunjukkan konsentrasi kependudukan yang relatif rendah (seperti: Pacitan, Situbondo dan Sampang). Daerah-daerah tersebut juga menunjukkan kemampuan penciptaan output yang tidak begitu masif dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki konsentrasi kependudukan (kepadatan penduduk) yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat suatu konsistensi antara aktifitas kependudukan dengan aktifitas penciptaan output dalam perekonomian. Senada dengan O'Sullivan (2012) yang menyatakan, bahwa ukuran setiap daerah menimbulkan suatu konsekuensi. Peningkatan ukuran daerah perkotaan (populasinya) dalam batasan tertentu akan menimbulkan keuntungan (seperti: skala ekonomi yang lebih besar).

Pengaruh *Employment* Terhadap Kemampuan Penciptaan Output

Hasil penelitian menemukan bahwa, kondisi demografis (*employment*) berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemampuan penciptaan output. Hal ini berarti, bahwa peningkatan kuantitas *employment* akan meningkatkan kemampuan penciptaan output. Semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja, maka kemampuan penciptaan output meningkat. Semakin banyak tenaga kerja terserap, maka kemampuan penciptaan output akan meningkat. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa kenaikan 1000 *employment* di suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur meningkatkan 42,156 M output di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu. Sesuai dengan teori Todaro dan Smith (2011), bahwa kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*), merupakan sesuatu yang positif dalam hal penciptaan output. Hal ini sejalan dengan teori neoklasik, Sukirno (2017), bahwa penambahan tenaga kerja bisa menambah produksi atau meningkatkan kemampuan penciptaan output (*ceteris paribus*). Hasil juga sejalan dengan teori ekonomi regional, Armstrong dan Taylor (2000), bahwa dalam konteks ekonomi regional besarnya *labor* akan menentukan seberapa besar kemampuan penciptaan output suatu daerah. Lebih lanjut lagi, semakin banyak bagian dari angkatan kerja yang terserap (*employment*), maka kemampuan penciptaan output akan semakin meningkat. Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ratih, *et al* (2017); Prastyadewi, Suman dan Pratomo (2013); Enjarwati dan Mursinto (2018), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan pengaruh yang positif dari peningkatan *employment* terhadap peningkatan output.

Peningkatan *employment* di Jawa Timur, berarti semakin banyak sumber daya manusia yang masuk dalam angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan ini akan memungkinkan output yang tercipta lebih banyak. Sehingga, kemampuan penciptaan output meningkat. Sebaliknya, ketika tenaga kerja yang terserap semakin sedikit, output yang tercipta di Jawa Timur akan lebih sedikit. Hal ini karena lebih banyak sumber daya manusia yang masuk dalam angkatan kerja tidak terpekerjakan atau tidak menghasilkan output. Semakin banyak tenaga kerja yang tidak terserap (menganggur), bisa menimbulkan biaya pengangguran. Biaya pengangguran bisa berupa *human capital depreciation*. Sejalan dengan penelitian ini, Ochsen dan Welsch (2011), menemukan bahwa pengangguran bisa memiliki berdampak pada *human capital depreciation*. Semakin lama tenaga kerja tidak terserap dalam pasar tenaga kerja atau menganggur, maka semakin lama *skill* yang dimilikinya tidak terpakai (tidak terasah). Dengan demikian, *human capital* akan menyusut. Oleh karenanya, *employment* di Jawa Timur perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan penciptaan output di Jawa Timur. Penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur harus terus ditingkatkan.

Pengaruh *Dependency* Terhadap Kemampuan Penciptaan Output

Hasil penelitian menemukan bahwa kondisi demografis (*dependency ratio*), berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemampuan penciptaan output. Hal ini berarti bahwa peningkatan *dependency ratio* akan menurunkan kemampuan penciptaan output. Semakin besar proporsi penduduk diluar usia kerja, maka semakin kecil kemampuan penciptaan output. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa kenaikan 1 persen *dependency ratio* di suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur akan menurunkan output sebesar Rp 837,553 M pada output Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu, Todaro dan Smith (2011) dan Zhang, *et al* (2019), bahwa semakin banyak sumber daya manusia yang berada pada usia produktif (usia kerja), maka potensi penciptaan

output akan semakin besar. Sebaliknya, semakin sedikit sumber daya manusia yang berada pada usia produktif (usia kerja), maka potensi penciptaan output akan semakin kecil.

Fenomena yang terjadi di Jawa Timur, terdapat daerah yang memiliki angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) relatif rendah. Seperti: Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang maupun kota Surabaya. Daerah-daerah ini notebenanya merupakan daerah yang tergolong maju. Hal ini bisa diartikan, bahwa terdapat suatu kecenderungan yang mana daerah yang maju relatif memiliki sumber daya manusia di usia produktif yang cukup untuk mendorong kemampuan penciptaan outputnya.

Sementara itu, daerah-daerah, seperti: Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Sampang memiliki *dependency ratio* yang relatif tinggi. Daerah-daerah tersebut bukanlah daerah maju, bahkan tergolong relatif tertinggal. Hal ini, berarti bahwa terdapat suatu kecenderungan bahwa daerah yang relatif tertinggal memiliki sumber daya manusia pada usia produktif cukup rendah (secara kuantitas atau proporsi).

Pengaruh Akses Pada P. Tanjung Perak Terhadap Kemampuan Penciptaan Output

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel *transport* (aksesibilitas/keterkaitan pada Pelabuhan Tanjung Perak) berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemampuan penciptaan output. Hal ini berarti bahwa semakin besar aksesibilitas/keterkaitan suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada Pelabuhan Tanjung Perak, maka semakin besar potensi kemampuan penciptaan outputnya. Berdasarkan hasil pengolahan data ditemukan, bahwa kenaikan 1 poin indeks hansen pada suatu Kabupaten/Kota di Jawa Timur akan meningkatkan 7,781 M output Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian terdahulu dan teori Gates, *et al* (2019) dan Krugman (1995), bahwa semakin besar akses atau keterkaitan suatu daerah dengan fasilitas *transport* yang menunjang perdagangan internasional, maka semakin besar potensi kemampuan penciptaan outputnya. Hal ini dikarenakan oleh daerah dengan akses atau kedekatan dengan pelabuhan utama, memiliki potensi yang lebih besar untuk mendorong perekonomiannya. Posisi daerah yang lebih strategis memberikan poin lebih bagi potensinya untuk meningkatkan kemampuan penciptaan output.

Berdasarkan indeks hansen, daerah Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pasuruan. merupakan daerah dengan aksesibilitas/keterkaitan terbilang erat dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Posisi yang relatif strategis, yakni memiliki keterkaitan atau kedekatan pada fasilitas *transport* menjadi poin penting dalam perekonomian. Daerah-daerah tersebut juga termasuk daerah maju dalam tipologi kelas.

Sementara itu, daerah-daerah dengan aksesibilitas yang rendah terhadap Pelabuhan Tanjung Perak, seperti: Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan dan Kota Blitar tidak memiliki kinerja perekonomian semasif Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Memang, terdapat daerah dengan kinerja perekonomian cukup masif, namun secara geografis relatif jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak dan tentunya memiliki indeks hansen terhadap Pelabuhan Tanjung Perak yang relatif rendah. Daerah yang dimaksud adalah Kota Kediri.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan teori lokasi. Terdapat kecenderungan bahwa, aktifitas perekonomian akan cenderung memilih dua opsi (dekat bahan baku atau dekat pasar). Sumber daya manusia ataupun sumber daya alam merupakan representasi dari bahan baku. Sedangkan, pasar atau *market* bisa direpresentasikan oleh fasilitas *transport* yang menunjang aktifitas perdagangan (seperti: Pelabuhan). Kota Surabaya bisa digambarkan sebagai daerah yang memiliki aktifitas perekonomian "*dekat dengan pasar*". Sedangkan, Kota Kediri merupakan representasi dari aktifitas perekonomian "*dekat dengan bahan baku*". Pasar dalam konteks ini, direpresentasikan oleh Pelabuhan Tanjung Perak. Bahan baku dalam hal ini direpresentasikan oleh sumber daya manusia.

Pengaruh Dummy Tol Terhadap Kemampuan Penciptaan Output

Hasil penelitian menemukan bahwa variabel *transport* (dummy jalan tol), berpengaruh signifikan secara positif terhadap kemampuan penciptaan output. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan yang positif pada daerah yang memiliki akses langsung pada jalan tol dibandingkan daerah yang tidak memiliki akses langsung pada jalan tol. Daerah dengan akses langsung pada jalan tol memiliki output Rp 14.366,413 M lebih besar dibandingkan daerah yang tidak memiliki akses langsung pada jalan tol. Keberadaan Tol di suatu daerah cenderung akan meningkatkan akses dan keterhubungan suatu daerah dengan daerah lainnya. Hal tersebut akan membuat daerah tersebut memiliki potensi yang lebih besar untuk mempermudah akses pasar diluar wilayahnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dan teori: Bosker, Deichmann, dan Roberts (2019); Krugman (1995), bahwa semakin baik atau semakin tersedia fasilitas publik/fasilitas *transport* di suatu daerah maka daerah tersebut memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh output yang lebih besar. Baik karena penghematan aglomerasi maupun karena *remoteness* yang berkurang. Sehingga, *cost* dalam suatu kegiatan ekonomi dan atau *transport cost* bisa berkurang.

Daerah-daerah yang *existing* atau memiliki akses tol sejak lama, diantaranya: Kota Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 1986, sudah ada jalan tol yang beroperasi di Jawa Timur. Jalan tol tersebut adalah tol Surabaya-Gempol (Pasuruan). Tol tersebut merupakan jalan tol pertama yang beroperasi di Jawa Timur. Tahun 1993, tol Surabaya-Gresik yang menghubungkan antara Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik mulai beroperasi. Tahun 2008, mulai beroperasi tol Waru-Juanda yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo.

Tahun 2018-2019, cukup banyak tol baru yang mulai beroperasi di wilayah Jawa Timur, diantaranya: Tol Mantingan-Ngawi-Kertosono (2018), Tol Surabaya-Mojokerto (2018), Tol Porong-Gempol (2018), Tol Gempol-Pasuruan (2018), Tol Gempol-Pandaan (2018), Tol Pasuruan-Probolinggo (2019), dan Tol Pandaan-Malang (2019). Semakin banyak daerah yang memiliki akses langsung pada jalan tol, misalnya: Kota Malang (terhubung dengan tol Pandaan-Malang), Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Jombang (terhubung dengan tol Mantingan-Ngawi-Kertosono), Kabupaten Malang (terhubung dengan tol Pandaan-Malang), Kabupaten Mojokerto (terhubung dengan tol Surabaya-Mojokerto), Kabupaten Probolinggo (terhubung dengan Tol Pasuruan-Probolinggo). Daerah-daerah yang memiliki akses langsung dengan tol atau terdapat pembangunan tol cenderung merupakan daerah yang memiliki kinerja perekonomian relatif baik dan atau daerah yang memiliki kedekatan/keterkaitan dengan daerah yang memiliki kinerja perekonomian relatif baik. Daerah yang memiliki kinerja perekonomian yang relatif baik yang dimaksud, seperti: Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, dan Kota Madiun. Daerah yang memiliki kedekatan atau keterkaitan dengan daerah yang memiliki kinerja perekonomian yang relatif baik, diantaranya: Kabupaten Malang (daerah *periphery* Kota Malang), Kabupaten Nganjuk (daerah *periphery* Kota Kediri), Kabupaten Jombang (daerah *periphery* Kota Kediri), Kabupaten Probolinggo (*periphery* Kabupaten Pasuruan), dan Kabupaten Ngawi (daerah *periphery* Kota Madiun).

Pengaruh Beta Kemampuan Penciptaan Output Terhadap Ketimpangan PDRB Perkapita

Hasil penelitian menemukan bahwa kemampuan penciptaan output yang dipengaruhi oleh variabel dependen (konsentrasi aktifitas ekonomi (sektor industri pengolahan), kondisi demografis (konsentrasi kependudukan, *employment* dan *dependency*) dan variabel *transport/jarak* (aksesibilitas pada P. Tanjung Perak dan dummy jalan tol)) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur. Kemampuan penciptaan output yang diukur dengan variabel dependen konsentrasi sektor industri pengolahan, konsentrasi kependudukan, *employment*, *dependency*, aksesibilitas pada P. Tanjung Perak, dan dummy jalan tol berpengaruh signifikan secara positif terhadap Ketimpangan PDRB Perkapita (yang diprosikan oleh PDRB Perkapita). Hal ini berarti, bahwa peningkatan kinerja variabel dependen akan berdampak pada kemampuan penciptaan output yang meningkatkan Ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur.

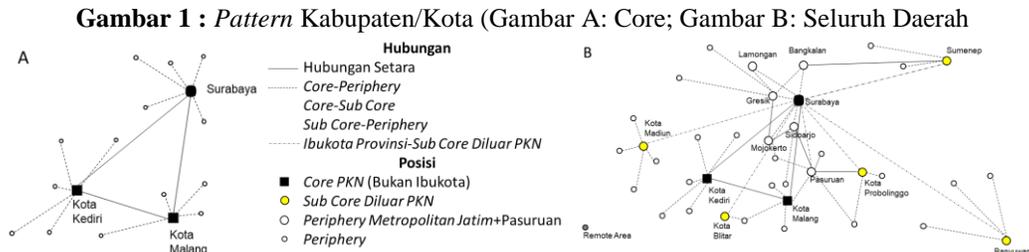
Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Ketimpangan PDRB Perkapita (*YCap*) bisa dijelaskan oleh variabel kemampuan penciptaan output yang dipengaruhi oleh variabel konsentrasi sektor industri pengolahan, kondisi demografis dan variabel *transport/jarak*. PDRB Perkapita dalam konteks ini, di-*drive* oleh kemampuan penciptaan output masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Yang mana, kemampuan penciptaan output dipengaruhi oleh konsentrasi sektor industri pengolahan, kondisi demografis dan variabel *transport/jarak*. *Gap* pada PDRB Perkapita di Jawa Timur disebabkan oleh perbedaan kemampuan penciptaan output.

Hasil tersebut menunjukkan kesesuaian dengan teori ekonomi regional, Glasson dan Marshall (2007); Sjafrizal (2008); dan Armstrong dan Taylor (2000), bahwa perkembangan suatu daerah (termasuk kemampuan penciptaan outputnya) dipengaruhi oleh perubahan populasi dan *employment* (kondisi demografis), serta perbedaan konsentrasi aktifitas ekonomi. Perubahan populasi dan *employment* berkaitan dengan perubahan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal tersebut akan menentukan kemampuan penciptaan output daerah. Aktifitas ekonomi daerah juga berdampak pada kemampuan penciptaan output daerah. Dalam hal ini, ketimpangan regional lebih disebabkan oleh konsentrasi ekonomi pada daerah-daerah kaya dalam suatu negara. Peningkatan permintaan pada daerah pinggiran tidak serta merta meningkatkan kemampuan penciptaan outputnya. Terlebih, jika permintaan berupa barang-barang hasil pertanian yang bersifat "*low income elasticity of demand*". Perpindahan tenaga kerja terampil dari daerah miskin ke daerah kaya juga membawa dampak yang negatif bagi daerah miskin. Hal ini akan mengurangi kemampuan daerah miskin dalam hal penciptaan output.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Ananda dan Pulungan (2018); Hartini (2017), bahwa kemampuan penciptaan output berdampak positif terhadap ketimpangan PDRB Perkapita. Penelitian ini didukung oleh penelitian Jackson dan Victor (2015), bahwa ketimpangan tidak selalu meningkat dengan penurunan kemampuan penciptaan output. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cerina dan Mureddu (2014), bahwa kemampuan penciptaan output yang meningkat pada daerah tertentu saja karena suatu konsentrasi kegiatan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan.

Pattern Kabupaten/Kota

Berdasarkan indeks gravitasi dan mempertimbangkan klasifikasi yang dilakukan oleh Batten (1995), *pattern* Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan pola jaringan. Pola juga menunjukkan bahwa posisi Surabaya sebagai Ibukota Provinsi tergolong sangat strategis. Hal ini ditunjukkan oleh gravitasi yang relatif kuat terhadap Kota Surabaya pada sebagian besar daerah *core* maupun *sub core*.



Sumber: Penulis, 2021

Hasil ini (*pattern* kabupaten/kota) di Jawa Timur ternyata juga menunjukkan kesesuaian dengan pola *culture* di Jawa Timur. Menurut Irwantoro (2010), Masyarakat Jawa Timur dibagi menjadi beberapa *subkultur* area besar, diantaranya: Jawa Mataraman, Arek, Pandalungan, dan Madura Pulau. Selain itu, terdapat subkultur lain, yakni: Osing, Tengger, dan Samin. Budaya Jawa Mataraman berkembang di wilayah Kediri, Madiun, dan sekitarnya (termasuk sebagian Blitar). Budaya Arek berkembang dari tlatah utara dan selatan, yakni: Surabaya-Malang, dan sekitarnya (termasuk sebagian Blitar). Budaya Pandalungan berkembang di wilayah Jember, Probolinggo, dan sekitarnya. Budaya Madura Pulau, berkembang di pulau Madura (Sumenep dan sekitarnya). Budaya Osing berkembang di Banyuwangi. Budaya Tengger berkembang di area Pasuruan. Sedangkan, budaya Samin berkembang di Bojonegoro. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh Sakti, Kuncoro, Ananda dan Maryunani (2010), yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara dimensi budaya dan kegiatan ekonomi. Perbedaan budaya tersebut dibentuk oleh lingkungan tempat tinggal.

Pattern Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara keseluruhan, menunjukkan bahwa karakteristik daerah Jawa Timur relatif unik. Hubungan antar massa dalam konteks ini, tidak hanya tentang jarak antar wilayah. Namun, dari sisi budaya ternyata memiliki perbedaan satu sama lain (dari satu kelompok wilayah dengan kelompok wilayah lainnya). Daerah-daerah *sub core* dalam konteks ini, ternyata bukan hanya dalam konteks ekonomi. Akan tetapi, *core* atau *sub core* disini ternyata juga menyangkut soal budaya.

Adapun, daerah Kota Malang, Kota Kediri, dan Kota Surabaya dalam konteks ini merupakan *core* pusat kegiatan Jatim. Daerah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini termasuk *sub core* pusat kegiatan Jatim. Daerah Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sumenep merupakan pusat kegiatan wilayah (setara *sub core*). Selanjutnya, daerah seperti Kabupaten Jember (bisa dipandang setara dengan *sub core*), karena perannya dalam *supply chain* industri pengolahan di Jawa Timur. Sedangkan, Kabupaten Bojonegoro dalam tipologi kelas ada pada kuadran satu. Namun, pertumbuhannya tidak stabil. Sehingga, tidak dimasukkan sebagai *subcore*. Sebagai suatu penegasan kembali, bahwa hubungan antar massa (*pattern* kabupaten/kota di Jawa Timur) ternyata menunjukkan kesesuaian dengan pola *subculture* di Jawa Timur.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa masalah Ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur merupakan masalah yang pelik. Mengingat bahwa, keberadaan Provinsi Jawa Timur yang cukup unik. Provinsi Jawa Timur sebagai Provinsi yang memiliki wilayah relatif luas dan tidak hanya berada di pulau Jawa saja. Oleh karenanya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- Ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur memang di-*drive* oleh perbedaan kemampuan penciptaan output yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis, dan variabel *transport/jarak*.
- Dispersi terjadi, namun terbatas (seperti: Pada Kabupaten Malang dan Kabupaten Tuban).
- Ketimpangan PDRB Perkapita masih terjadi di Jawa Timur.
- *Pattern* Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan pola yang relatif kompleks dan lebih mengarah pada bentuk jaringan.
- *Pattern* Kabupaten/Kota yang didasarkan pada indeks gravitasi (hubungan antar massa) ternyata menunjukkan kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *subculture* pada *region-region* di Jawa Timur.
- Penanganan masalah Ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur tidak bisa digeneralisasikan.

- Diperlukan bauran kebijakan dalam penanganan ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur, setidaknya dengan memperhatikan *pattern* Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- Kebijakan yang bersifat agregatif dan menekankan pada peningkatan output agregat (*Pro-Growth*), boleh jadi akan menguntungkan bagi daerah-daerah *core* maupun *sub core* atau *periphery* yang memiliki *core* relatif maju.
- Kebijakan yang bersifat distributif dan mengembangkan ekonomi lokal (*Pro-Dispersi*), masih memungkinkan untuk dilakukan pada daerah *periphery* yang memiliki potensi tertentu di daerah atau wilayahnya.
- *Remote area* atau daerah yang memiliki kerugian secara geografis akan cukup sulit untuk dikembangkan. Upaya mengurangi kerugian secara geografis memang bisa dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas. Namun, jika potensi ekonomi atau aktifitas ekonomi pada *remote area* relatif terbatas. *Cost* dari pembangunan akan menjadi relatif besar, karena dampak dari pembangunan tidak mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, migrasi menjadi jawaban atas permasalahan. Migrasi interregional yang bisa mentransfer *income* (semacam remitansi dalam konteks lokal) ke daerah yang relatif tidak maju boleh jadi menjadi salah satu solusi untuk masalah ketimpangan PDRB Perkapita. Jadi, daerah yang relatif tidak maju menyediakan input bagi daerah maju atau relatif maju.
- Pola migrasi yang lebih merata juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan oleh pentingnya faktor demografis dalam proses pembentukan output di Jawa Timur yang men-*drive* Y_{Cap} .

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian (analisis multivariat) menunjukkan bahwa konsentrasi aktifitas ekonomi sektor industri pengolahan, konsentrasi kependudukan, employment, dan variabel *transport/jarak* (aksesibilitas terhadap pelabuhan Tanjung Perak dan Dummy Tol) berpengaruh signifikan secara terhadap kemampuan penciptaan output. Sedangkan, *dependency ratio* berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemampuan penciptaan output di Jawa Timur.
2. Hasil penelitian (analisis multivariat) menunjukkan bahwa kemampuan penciptaan output yang dipengaruhi oleh konsentrasi aktifitas ekonomi sektor industri pengolahan, kondisi demografis (konsentrasi kependudukan, employment, dan dependency), serta variabel *transport/jarak* (aksesibilitas terhadap pelabuhan tanjung perak dan dummy jalan tol) berpengaruh signifikan secara positif terhadap Ketimpangan PDRB Perkapita (Y_{Cap}). Hasil ini berarti, bahwa ketimpangan PDRB Perkapita (yang diprosikan dengan (Y_{Cap})) di-*drive* oleh perbedaan kemampuan penciptaan output yang dorong oleh perbedaan konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis dan variabel *transport/jarak*.
3. Masalah ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur tidak bisa digeneralisasikan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan poin kesimpulan pertama, secara umum bisa dinyatakan bahwa cara untuk meningkatkan kemampuan penciptaan output pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur bisa dilakukan dengan meningkatkan konsentrasi aktifitas ekonomi dan employment. Selain itu, peningkatan konsentrasi kependudukan pada batasan tertentu bisa meningkatkan kemampuan penciptaan output Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Variabel *transport/jarak* juga berperan penting untuk meningkatkan kemampuan penciptaan output Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Komposisi penduduk juga penting untuk meningkatkan kemampuan penciptaan output. Dengan demikian, saran kebijakan yang bisa ditawarkan adalah dalam formulasi kebijakan secara agregat perlu dipertimbangkan faktor konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis dan *transport/jarak*.
2. Berdasarkan poin kesimpulan kedua, secara umum bisa dinyatakan bahwa ketimpangan PDRB Perkapita (yang diprosikan dengan (Y_{Cap})) di-*drive* oleh perbedaan kemampuan penciptaan output yang dorong oleh perbedaan konsentrasi aktifitas ekonomi, kondisi demografis dan variabel *transport/jarak*. Pada satu sisi, daerah yang memiliki kemampuan penciptaan output yang relatif memadai akan memiliki PDRB Perkapita relatif tinggi. Pada sisi yang lain, daerah yang memiliki kemampuan penciptaan output yang relatif rendah akan memiliki PDRB Perkapita relatif rendah. Sehingga, saran yang bisa ditawarkan adalah formulasi kebijakan secara agregat perlu mempertimbangkan faktor kemampuan penciptaan output daerah.
3. Berdasarkan poin kesimpulan yang ketiga, saran yang bisa ditawarkan, diantaranya:
 - Formulasi kebijakan untuk mengatasi ketimpangan di Jawa Timur tidak bisa digeneralisasikan. Formulasi kebijakan perlu memperhatikan *pattern* Kabupaten/Kota atau karakteristik daerah di Jawa Timur. Perlu diingat, bahwa terdapat *trade off* pada setiap formulasi kebijakan.

- Kebijakan yang bersifat agregatif dan meningkatkan output secara agregat bisa dilakukan, namun dampaknya akan terbatas pada daerah *core* maupun *sub core* atau *periphery* di sekitarnya.
- Kebijakan yang bersifat distributif bisa dilakukan pada daerah *periphery* yang memiliki potensi tertentu. Namun, perlu tetap memperhatikan *pattern* hubungan Kabupaten/Kota.
- Kerugian geografis pada *remote area* boleh jadi bisa dikurangi dengan peningkatan aksesibilitas. Namun, *cost*-nya bisa sangat besar, jika tidak diimbangi dengan potensi daerah yang memadai. Hal ini dikarenakan oleh dampak pembangunan yang tidak sepadan dengan *cost*-nya. Dengan demikian, migrasi diperlukan (migrasi yang berpotensi untuk mentransfer *income* dari daerah maju ke daerah relatif tertinggal).
- Pola migrasi yang lebih merata diperlukan untuk mengurangi masalah Ketimpangan PDRB Perkapita di Jawa Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2018. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. edisi 2. Yogyakarta: Expert.
- Ananda, C. F. dan Pulungan, A. M. 2018. Determinant of Income Inequality In Indonesia: Study Case 33 Provinces In 2011-2016. International Academic Conference, Vienna. ISBN 978-80-87927-83-0, IISES.
- Anonim. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48.
- Armstrong, H. dan Taylor, J. 2000. *Regional Economics and Policy*. 3rd Ed. Oxford: Blackwell Publishers Inc.
- Bosker, M., Deichmann, U., Roberts, M. 2018. Hukou and highways the impact of China's spatial development policies on urbanization and regional inequality. doi: 10.16/j.regsciurbeco.2018.05.007.
- Batten, D. F. 1995. Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century. *Urban Studies*, Vol. 32, No. 2, 1995, 313-327.
- Cohen, J.P. dan Paul, J. M. 2009. Agglomeration, productivity, and regional growth: production theory approaches. Dalam Capello, R. dan Nijkamp, P.(eds.), *Handbook of Regional Growth and Development Theory* (hlm. 101-117). Cheltenham: Edward Elgar.
- Enjarwati, T. dan Mursinto, D. 2018. Impact of Government Fiscal Space and Manpower To The Gross Domestic Product of Indonesia Period 1990- 2015. *Journal of Developing Economics*. June 2018; 03 (1): 20-32 ISSN: 2541-1012.
- Gates, *et al.* 2019. *Transport and Inequality: An evidence review for the Department for Transport*. London: NatCen Social Research.
- Glasson. J. dan Marshall. T. 2007. *Regional Planning*. London and New York: Routledge.
- Hartini, N. T. 2017. Pengaruh PDRB, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 6, Nomor 6, Tahun 2017.
- Hamilton, Bob. 2003. *Utilizing The Probability Gravity Model to Evaluate Supermarket Expansion in Southern Palm Beach County Florida*. Florida: University of Florida.

- Irwantoro. 2010. Pemetaan Ragam Sosial Kultural Masyarakat di Jawa Timur Dalam Hubungan Dengan Perubahan Sosial Budaya dan Sosial Politik. *Cakrawala* Vol. 5 No. 1 Desember 2010 : 29-41.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Jackson, T. dan Victor, P. A. 2015. Does slow growth lead to rising inequality? Some theoretical reflections and experimental simulations. *Ecological Economics* (2015).
- Jhingan, M. L. 1996. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krugman, P. dan Venables, A. J. 1995. Globalization and the Inequality of Nations. *The Quarterly Journal Of Economics* Vol. CX November 1995 Issue 4.
- Kaldor, N. 1956. Alternative Theories of Distribution. *The Review of Economic Studies*, Vol. 23, No. 2 (1955-1956), pp. 83-100.
- Myrdal, G. 1976. *Bangsa-Bangsa Kaya dan Miskin*. Jakarta: PT.Gramedia.
- O'Sullivan, A. 2012. *Urban Economics*. Eight Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Ochsen, C dan Welsch, H. 2011. The social cost of unemployment: accounting for unemployment duration. *Applied Economics*, 2011, 43, 3999-4005.
- Prastyadewi, M. I., Suman, A. dan Pratomo, D. S. 2013. Labor Absorption and Its Impact on Gross Regional Domestic Product. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 14, Nomor 2, Desember 2013, hlm. 147-159.
- Ratih, G. A. P. A., Utama, M. S., Yasa, I. N. M. 2017. Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Tingkat Kemiskinan Pada Wilayah Sarbagita di Provinsi Bali. *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6.1 (2017): 29-54. ISSN: 2337-3067.
- Sukirno, S. 2017. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.
- Sakti, R. K., Kuncoro M., Ananda C. F., dan Maryunani. 2010. Studi Hubungan Budaya dengan Aglomerasi Ekonomi (North-South Corridor) Di Jawa Timur. *WACANA* Vol. 13 No. 3, ISSN. 1411-0199. Malang: Universitas Brawijaya.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Sakti, R. K. 2005. Analisis Spasial Industri Besar Menengah Jawa Timur Studi Kasus Koridor Utara Selatan Tahun 1990-2001. Tesis Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Gajahmada.
- Todaro, M. P. dan Smith, S. C. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 11, Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Yegorov, Y. 2015. Economic Role of Population Density. 55th Congress of European Regional Science Association: "World Renaissance: Changing roles for people and places", 25-28 August 2015, Lisbon, Portugal, European Regional Science Association, Louvain-la-Neuve.
- Waldfogel, J. 2008. The Median Voter and The Median Consumer: Local Private Goods and Population Composition. *Journal of Urban Economics* 63 (2008) 567-582.
- Zhang, H., Ke, L., dan Ding, T. D. 2019. The Effect of Chinese Population Aging on Income Inequality: Based on a Micro-Macro Multiregional Dynamic CGE Modelling Analysis. *Emerging Market Finance & Trade*, 1-21, 2019.